

Analisis Trend Kepesertaan Program BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pangkalpinang Tahun 2013-2018

ROSYADI MUSTAQIM

Universitas Bangka Belitung, E-mail: rozyadimustaqim9@gmail.com

ABSTRAK

Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang mempunyai peranan paling penting serta sebagai subjek dalam proses produksi guna menghasilkan barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, untuk menjamin kesejahteraan bagi tenaga kerja diperlukan adanya program jaminan sosial. Dalam hal ini peranan pemerintah sangat penting untuk menjalankan program jaminan sosial tenaga kerja yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Pangkal Pinang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui trend perkembangan kepesertaan Program BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pangkal Pinang tahun 2013-2018 beserta manfaat apa saja yang diterima tenaga kerja/masyarakat sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder untuk menghitung persentase trend data tersebut, peneliti menggunakan Model Grafik dan Percentage dalam metode analisis deskriptif dengan bantuan computer Microsoft Excel 2013. Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa pada prinsipnya program jaminan sosial ketenagakerjaan ini sangat bermanfaat bagi keselamatan dan kesejahteraan pekerja dalam bekerja. Analisis lainnya menjelaskan bahwa secara keseluruhannya jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pangkal Pinang mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan pada tahun dasar 2013 tetapi pada dasarnya trend kepesertaan mengalami fluktuasi yang disebabkan oleh berbagai macam faktor. Hal ini terlihat dari pada tahun 2015 persentase kepesertaan secara umum dari berbagai program mengalami penurunan drastis daripada tahun 2014.

Kata Kunci : Peserta BPJS Ketenagakerjaan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Pensiun

ABSTRACT

The center of work is one of the factors of production which has the most important role and as a subject in the production process in order to produce goods and services that are needed by the community in economic activities. Therefore, to guarantee the welfare of the workforce, a social security program is needed. In this case the role of the government is very important to run a workforce social security program organized by the Managing Social Security Agency of the Pangkal Pinang Branch. This study aims to determine trends in the development of BPJS Employment Program Branch of Pangkal Pinang in 2013-2018 along with any benefits received by the workforce / community as BPJS Employment participants. The data used are primary and secondary data to calculate the percentage of the data trend, the researcher uses the Graph Model and Percentage in the descriptive analysis method with the help of Microsoft Excel 2013 computer. From the results of research conducted by researchers shows that in principle the employment social security program is very beneficial for the safety and welfare of workers at work. Another analysis explained that overall the membership of BPJS Employment of Pangkal Pinang Branch experienced a significant increase compared to the base year 2013 but basically the participation trend experienced fluctuations caused by various factors. This can be seen from the 2015 percentage of participation in general from various programs experiencing a drastic decrease compared to 2014.

Keywords: *BPJS Employment Participant, Work Accident Insurance, Death Insurance, Old Age Insurance, and Pension Insurance.*

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi perekonomian dunia saat ini, peranan ketenagakerjaan dalam dunia perdagangan sangat penting. Demikian pula keberadaan setiap perusahaan dalam system perekonomian Indonesia. Mengingat pentingnya kedudukan tenaga kerja dalam proses pembangunan ekonomi, tentu sudah semestinya kesejahteraan tenaga kerja perlu mendapat perlindungan dan peningkatan kesejahteraan yang baik. Pembangunan pada hakekatnya bukanlah sebuah proses yang semata bertujuan untuk meningkatkan tersedianya sumber daya di masyarakat, tetapi sejatinya, seperti yang dikemukakan Amartya Sen dalam bukunya "*Commodities and Capabilities*" (1985), pembangunan harus dipandang sebagai sebuah proses besar dalam memberdayakan dan mengembangkan kemampuan masyarakat (Siregar, 2009).

Pembangunan Nasional diarahkan untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, serta diarahkan untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya dan seluruh masyarakat Indonesia. Pembangunan nasional yang kita laksanakan dapat dipandang sebagai suatu proses transformasi budaya dan transformasi sosial ekonomi yang saling berkaitan.

Keadaan tenaga kerja dan kesempatan kerja di Indonesia ditandai oleh adanya beberapa masalah pokok yang bersifat struktural. Masih tingginya tingkat pertumbuhan penduduk berarti masih tetap tinggi pula pertumbuhan angkatan kerja. Sejak krisis moneter pada pertengahan 1997 yang berdampak pada masalah kehidupan ekonomi masyarakat yang salah satunya ditandai oleh jumlah penduduk miskin (sampai akhir juni 1998) mencapai 79,4 juta jiwa (39,1 Persen dari seluruh populasi) dan tingkat pengangguran sebesar 15,4 juta jiwa (17,1 Persen dari angkatan kerja). Diperkirakan pertumbuhan angkatan kerja lebih tinggi daripada pertumbuhan penduduk oleh karena struktur umur penduduk yang relatif muda. Hal ini berarti banyak tenaga kerja yang berusia

muda dan umumnya kurang atau belum trampil dan kurang pengalaman.

Tingkat pengangguran tahun 2003 sebesar 9,5 persen jauh lebih tinggi dibandingkan sebelum krisis ekonomi. Pada tahun 1996, tingkat pengangguran hanya sebesar 4,89 persen. Bahkan pada saat terjadi krisis ekonomi pada tahun 1997 dan 1998, tingkat pengangguran hanya mencapai 4,68 persen dan 5,46 persen. Pada tahun 1999 dan 2000, tingkat pengangguran berturut-turut berada pada tingkat 6,36 persen dan 6,08 persen. Selanjutnya pada tahun 2017 dan 2018, tingkat pengangguran berturut-turut terus mengalami penurunan pada angka 5,13 persen (6,87 juta jiwa) dan 5,01 persen (6,82 juta jiwa).

Pembangunan Nasional yang terus berlangsung selama ini telah memperluas kesempatan kerja, dan memberikan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi tenaga kerja dan keluarganya. Namun kemampuan bekerja dan penghasilan dapat berkurang atau hilang karena berbagai risiko yang dialami tenaga kerja yaitu: kecelakaan, cacat, sakit, hari tua, dan meninggal dunia. Oleh karenanya untuk menanggulangi risiko-risiko tersebut, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja mengatur pemberian jaminan kecelakaan kerja, jaminan pemeliharaan kesehatan, jaminan hari tua dan jaminan kematian.

Berdasarkan persetujuan DPR RI, Pemerintah UU No.3 Tahun 1992 tentang Jamsostek yang mengatur pemberian jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pemeliharaan kesehatan sebagai perlindungan dasar bagi tenaga kerja dan keluarganya dalam menghadapi risiko-risiko sosial-ekonomi, dan mengurangi ketidakpastian masa depan. Pada hakikatnya, seluruh kemanfaatan yang diberikan dalam Undang-Undang Jamsostek jauh lebih ditingkatkan daripada yang diberikan dalam Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1977 tentang Asuransi Tenaga Kerja.

Tonggak penting lahirnya Jamsostek adalah UU No. 3 tahun 1992 tentang Jaminan

Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK). Melalui PP No.36/1995 ditetapkannya PT. Jamsostek sebagai badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Program Jamsostek memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya, dengan memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang, akibat risiko sosial.

Kiprah Perusahaan PT Jamsostek (Persero) yang mengedepankan kepentingan dan hak normatif Tenaga Kerja di Indonesia terus berlanjut. Sampai saat ini, BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan 4 program, yang mencakup Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) bagi seluruh tenaga kerja dan keluarganya terus berlanjutnya hingga berlakunya UU No. 24 Tahun 2011.

Pada tahun 2011, ditetapkannya UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Sesuai dengan amanat Undang-Undang, pada tanggal 1 Januari 2014 PT Jamsostek berubah menjadi Badan Hukum Publik. PT Jamsostek (Persero) kemudian bertransformasi menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan tetap dipercaya untuk menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja yang meliputi JKK, JKM, JHT dengan penambahan Jaminan Pensiun (JP) terhitung mulai dari 1 Juli 2015.

Di Provinsi Kep. Bangka Belitung khususnya Pulau Bangka yang berkantor Cabang di Pangkal Pinang, masyarakatnya harus berpartisipasi penuh dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan baik yang bekerja sebagai Penerima Upah (PU), Bukan Penerima Upah (BPU), ataupun Jasa Konstruksi (JAKON).

Jumlah keseluruhan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pangkal Pinang pada tahun 2013-2018 mengalami fluktuasi jumlah kepesertaan tertinggi ialah pada tahun 2018 sebesar 104.348 jiwa dan jumlah kepesertaan terendah pada tahun 2015 sebesar 28.550 jiwa. Hal tersebut menunjukkan masih rendahnya

partisipasi masyarakat dalam mengikuti Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam keikutsertaan sebagai peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan akan menyebabkan rendahnya kinerja BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pangkal Pinang. Kinerja suatu organisasi/perusahaan dapat diukur dari pencapaian sasaran dan tujuan program yang telah ditentukan dalam kurun waktu tertentu.

Kinerja suatu perusahaan/organisasi sektor publik menjadi sorotan paling penting didalam pelaksanaan program kerja suatu perusahaan/organisasi, demikian juga halnya dengan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pangkal Pinang. Namun BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pangkal Pinang dalam melaksanakan tujuannya belum terlaksana dengan baik, dapat dilihat dari jumlah pencapaian kepesertaan seperti pada tabel berikut:

Program Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pangkal Pinang Tahun 2013-2018 mengalami fluktuasi. Realisasi jumlah program BPJS Ketenagakerjaan tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 104.348 jiwa dan terendah terjadi pada tahun 2015 sebesar 28.550 jiwa. Belum tercapainya target kepesertaan menunjukkan bahwa kinerja BPJS Ketenagakerjaan belum maksimal. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam keikutsertaan untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan menjadi sebuah ancaman yang akan menghambat pencapaian target dalam memberikan jaminan sosial keseluruhan tenaga kerja di Provinsi Kep. Bangka Belitung, khususnya yang berada didaerah Pulau Bangka sehingga sangat mempengaruhi kinerja BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pangkal Pinang itu sendiri.

Berdasarkan rumusan masalah yang terdapat dalam tulisan ini, adapun yang menjadi tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui trend perkembangan kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan Pangkal Pinang Tahun 2013-2018.

KAJIAN LITERATUR Ketenagakerjaan

Jumlah atau besarnya penduduk umumnya dikaitkan dengan pertumbuhan pendapatan perkapita suatu negara, yang secara kasar mencerminkan kemajuan perekonomian negara tersebut. Ada pendapat yang mengatakan bahwa jumlah penduduk yang besar adalah sangat menguntungkan bagi pembangunan ekonomi. Tetapi ada pula yang berpendapat lain yaitu bahwa justru penduduk yang jumlahnya sedikit yang dapat mempercepat proses pembangunan ekonomi ke arah yang lebih baik. Disamping kedua pendapat ini, ada pula pendapat yang mengatakan bahwa jumlah penduduk suatu negara harus seimbang dengan jumlah sumber-sumber ekonominya, baru dapat diperoleh kenaikan pendapatan nasional. Ini berarti jumlah penduduk tidak boleh terlampaui sedikit tetapi juga tidak boleh terlalu banyak. Jumlah penduduk yang semakin besar telah membawa akibat jumlah angkatan kerja yang semakin besar pula. Ini berarti akan semakin besar pula jumlah orang yang mencari pekerjaan atau menganggur. Agar dapat dicapai keadaan yang seimbang, maka seyogyanya mereka semua dapat tertampung dalam suatu pekerjaan yang cocok dan sesuai dengan keinginan serta keterampilan mereka. Ini akan membawa konsekuensi bahwa perekonomian harus selalu menyediakan lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja baru. Dengan demikian pembangunan ekonomi sangat diperlukan untuk memperkecil tingkat pengangguran. Dengan pembangunan ekonomi diharapkan laju pertumbuhan ekonomi selalu dipertahankan pada tingkat yang lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan penduduk, sehingga kegiatan perekonomian akan menjadi lebih luas dan selanjutnya dapat memperkecil jumlah orang yang menganggur.

Jaminan Sosial

Meskipun sistem jaminan sosial mencakup sejumlah program jaminan pendapatan, tetapi tujuan utamanya adalah pemberian suatu jaminan pendapatan hari tua bagi karyawan. Perorangan yang bekerja sekarang ini dikenakan pajak, demikian pula majikan mereka, dan penerimaan ini dipakai untuk membiayai tunjangan yang berlaku sekarang bagi perorangan yang sudah pensiun karena usia lanjut. Seperti analisis tentang

program asuransi pengangguran telah menunjukkan, tidak menjadi soal apakah pajak itu dikenakan pada pekerja, majikan atau kedua-duanya. Dalam semua kasus, kecondongan positif kurva penawaran tenaga kerja akan menghasilkan beban pajak yang dipikul baik oleh karyawan maupun majikan.

Oleh karena pekerja yang sekarang digunakan tenaganya dan majikan mereka harus membayarkan tunjangan bagi orang-orang yang telah pensiun karena lanjut usia, maka suatu perusahaan dalam rasio jumlah orang yang pensiun terhadap jumlah pekerja yang masih aktif kerja akan mempengaruhi beban pembayaran terhadap karyawan yang masih aktif bekerja sekarang. Jika jumlah pekerja yang masih aktif meningkat paling sedikit sama dengan jumlah yang sudah pensiun, maka tingkat tunjangan dapat dinaikkan dalam perjalanan waktu tanpa perlu menambah beban pajak yang dibebankan kepada angkatan kerja yang sekarang.

Pada hakikatnya skenario ini telah merwarnai berbagai dasawarsa yang mengikuti awal sistem jaminan sosial pada tahun 1935. Lebih mutakhir lagi, kecenderungan telah berbalik sehingga rasio tenaga kerja yang sudah pensiun atau masih aktif akan terus meningkat dalam sisi abad ini. Jelas, mempertahankan tingkat tunjangan nyata yang ada akan memerlukan tambahan lanjutan dalam beban pajak dari pekerja yang sekarang.

Sejak diperkenalkannya sistem jaminan sosial ini telah banyak mengurangi motivasi perorangan yang bekerja untuk menabung bagi hari tua mereka. Berkurangnya tabungan nasional berarti bahwa suatu bagian kecil dari pendapatan nasional dapat diperleh untuk investasi dalam kemampuan produktif bangsa, yang ada gilirannya mengakibatkan kelambanan pertumbuhan pendapatan perkapita.

Jaminan sosial dapat diartikan secara luas dan dapat pula diartikan secara sempit. Dalam pengertiannya yang luas jaminan sosial ini meliputi berbagai usaha yang dapat dilakukan oleh masyarakat dan/atau pemerintah. Usaha-usaha tersebut oleh Sentanoe Kertonegoro (dalam Siregas 2009) dikelompokkan dalam empat kegiatan usaha utama sebagai berikut:

1. Usaha-usaha yang berupa pencegahan dan pengembangan, yaitu usaha-usaha di bidang kesehatan, keagamaan, keluarga berencana, pendidikan, bantuan hukum dan lain-lain yang dapat dikelompokkan dalam Pelayanan Sosial (*Social Service*).
2. Usaha-usaha yang berupa pemulihan dan penyembuhan, seperti bantuan untuk bencana alam, lanjut usia, yatim piatu, penderita cacat, dan berbagai ketunaan yang dapat disebut sebagai Bantuan Sosial (*Social Assistance*).
3. Usaha-usaha yang berupa pembinaan, dalam bentuk perbaikan gizi, perumahan, transmigrasi, koperasi dan lain-lain yang dapat dikategorikan sebagai Sarana Sosial (*Social Infra Structure*).
4. Usaha-usaha di bidang perlindungan ketenagakerjaan yang khusus ditujukan untuk masyarakat tenaga kerja yang merupakan inti tenaga pembangunan dan selalu menghadapi risiko-risiko sosial ekonomis, digolongkan dalam Asuransi Sosial (*Social Insurance*).

Mencakup usaha-usaha di atas, maka secara definitif pengertian jaminan sosial secara luas dapat dijumpai dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial, Pasal 2 ayat (4) sebagai berikut: “Jaminan sosial sebagai perwujudan sekuritas sosial adalah seluruh sistem perlindungan dan pemeliharaan Kesejahteraan Sosial bagi warga negara yang diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau masyarakat guna memelihara taraf kesejahteraan sosial”.

UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dalam pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa jaminan sosial adalah: “Suatu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.”

Kemudian, Kaneth Thomson, seorang tenaga ahli pada Sekretariat Jenderal *International Social Security Association (ISSA)*, mengemukakan perumusan jaminan sosial sebagai berikut: (Introduction To The Principle of Social Security dipetik dari Sentanoe Kertonegoro (dalam Siregar, 2009)).

“Jaminan sosial dapat diartikan sebagai perlindungan yang diberikan masyarakat bagi anggota-anggotanya untuk risiko-risiko atau peristiwa-peristiwa tertentu dengan tujuan sejauh mungkin untuk menghindari terjadinya peristiwa-peristiwa tersebut yang dapat mengakibatkan hilangnya atau turunnya sebagian besar penghasilan, dan untuk memberikan pelayanan medis dan/atau jaminan keuangan terhadap konsekuensi ekonomi dari terjadinya peristiwa tersebut, serta jaminan untuk tunjangan keluarga dan anak.”

METODE PENELITIAN

Tempat Kegiatan

Kegiatan Kuliah Kerja Praktek (KKP) beserta laporan hasil penelitian yang saya buat bertempat dikantor Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Pangkal Pinang yang beralamatkan di Jl. Gabek Raya, Gabek Satu, Kec. Gabek, Kota Pangkal Pinang, Prov. Kepulauan Bangka Belitung 33172. Kontak (0717) 431415, www.bpjsketenagakerjaan.go.id.

Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digubakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Pangkal Pinang, bahan ilmiah, buku literatur, media internet serta bahan bacaan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

Metode Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis deskriptif yaitu metode yang digunakan untuk menganalisis suatu data yang berhubungan dengan trend perkembangan kepesertaan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Pangkal Pinang Tahun 2013-2018.

Peneliti disini juga menggunakan rumus Persentase untuk mengetahui jumlah pertumbuhan kepesertaan pertahunnya, gunanya agar peneliti dapat membandingkan tingkat pertumbuhan persentase kepesertaan pertahunnya dalam bentuk persen.

PEMBAHASAN

Gambaran Umum BPJS Ketenagakerjaan Pengertian BPJS Ketenagakerjaan

BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan merupakan program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu dan penyelenggaraannya menggunakan mekanisme asuransi sosial.

Tugas BPJS Ketenagakerjaan

Tugas BPJS Ketenagakerjaan ialah sebagai berikut:

1. Melakukan dan/atau menerima pendaftaran peserta;
2. Memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja;
3. Menerima bantuan iuran dari pemerintah;
4. Mengelola dana jaminan sosial untuk kepentingan peserta;
5. Mengumpulkan dan mengelola data peserta program jaminan sosial;
6. Membayarkan manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program jaminan sosial; dan
7. Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial kepada peserta dan masyarakat.

Fungsi BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana berfungsi menyelenggarakan:

1. Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Menurut PP No. 44 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, jaminan kecelakaan kerja (JKK) adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) memberikan kompensasi dan rehabilitasi bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan pada saat dimulai berangkat bekerja sampai tiba kembali dirumah atau menderita

penyakit akibat hubungan kerja. Iuran untuk program JKK ini sepenuhnya dibayarkan oleh perusahaan.

2. Program Jaminan Kematian (JKM)

Jaminan Kematian menurut PP No. 44 tahun 2015 adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika ahli waris meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja.

Jaminan Kematian diperuntukkan bagi ahli waris dari peserta program BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal bukan karena kecelakaan kerja.

3. Program Jaminan Hari Tua (JHT)

Jaminan Hari Tua diatur dalam PP No. 46 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program Hari Tua. Menurut PP tersebut, Jaminan Hari Tua adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.

Jaminan hari tua merupakan program tabungan wajib yang berjangka panjang dimana iurannya ditanggung oleh pekerja/buruh dan pengusaha, namun pembayarannya kembali hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Dengan demikian, pengertiannya adalah sebagai berikut:

1. Program jaminan hari tua ini bersifat wajib. Sebab tanpa kewajiban yang dipaksakan dengan sanksi sering kali sulit bagi pekerja/buruh untuk menabung demi masa depannya sendiri, dan bagi pengusaha untuk memikirkan kesejahteraan para pekerja/buruhnya.
2. Program ini berjangka panjang karena memang dimaksudkan untuk hari tua sehingga tidak bisa diambil sewaktu-waktu.
3. Iurannya ditanggung oleh pekerja/buruh sendiri ditambah iuran dari pengusaha untuk diakreditasi pada rekening masing-masing peserta

(pekerja/buruh) oleh badan penyelenggara.

4. Adanya persyaratan jangka waktu pengambilan jaminan. Ini dimaksudkan agar jumlahnya cukup berarti untuk bekal hari tua, kecuali peserta yang bersangkutan meninggal dunia atau cacat tetap total sebelum hari tua.

Kepesertaan jaminan hari tua bersifat wajib secara nasional bagi semua pekerja/buruh yang memenuhi persyaratan. Persyaratan yang dimaksudkan adalah khusus bagi pekerja/buruh harian lepas, borongan dan pekerja/buruh dengan perjanjian kerja waktu tertentu yang harus bekerja di perusahaannya lebih dari tiga bulan. Artinya kalau mereka bekerja kurang dari tiga bulan pengusaha tidak wajib mengikutsertakannya dalam program jaminan hari tua. Pengusaha hanya wajib mengikutsertakan mereka dalam program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.

Program Jaminan Hari Tua ditujukan sebagai pengganti terputusnya penghasilan tenaga kerja karena meninggal, cacat, atau hari tua dan diselenggarakan dengan sistem tabungan hari tua. Program Jaminan Hari Tua memberikan kepastian penerimaan penghasilan yang dibayarkan pada saat tenaga kerja mencapai usia 56 tahun atau telah memenuhi persyaratan tertentu.

4. Program Jaminan Pensiun (JP)

Sesuai dengan PP No.45 tahun 2015 tentang penyelenggaraan program jaminan pensiun, jaminan pensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.

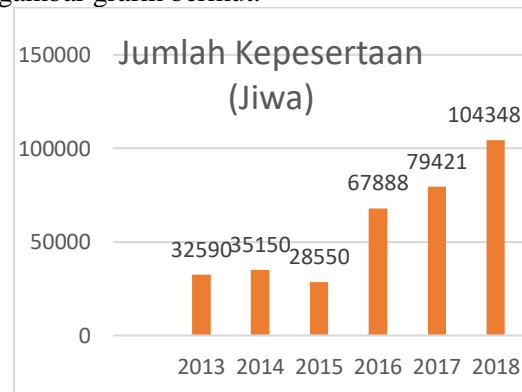
Sedangkan program jaminan pensiun adalah pembayaran berkala jangka panjang sebagai substitusi dari

penurunan/hilangnya penghasilan karena peserta mencapai usia tua (pensiun), mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.

Berbeda dengan program BPJS Ketenagakerjaan lainnya (JKK, JK, JHT) yang sudah beroperasi sejak Januari 2014, program Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan, baru mulai beroperasi pada 1 Juli 2015.

Analisis Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pangkal Pinang

Partisipasi masyarakat dalam keikutsertaan sebagai peserta dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Pangkal Pinang menjadi sorotan karena turun naiknya minat masyarakat dalam mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan. Akumulasi Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Pangkal Pinang dari Tahun 2013 sampai 2018 dapat dilihat pada gambar grafik berikut.



Sumber : BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pangkal Pinang, 2019

Gambar 1. Grafik Jumlah Kepesertaan Program BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pangkal Pinang Tahun 2013-2018

Berdasarkan gambar 1 diketahui bahwa tingkat partisipasi masyarakat Provinsi Kep. Bangka Belitung khususnya Pulau Bangka telah mengalami fluktuasi dengan jumlah partisipasi tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 104.348 jiwa dan yang terendah terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 28.850 jiwa.

Melihat tabel dan analisa diatas pada tahun 2018 tingkat partisipasi masyarakat dalam keikutsertaan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan cabang Pangkal Pinang

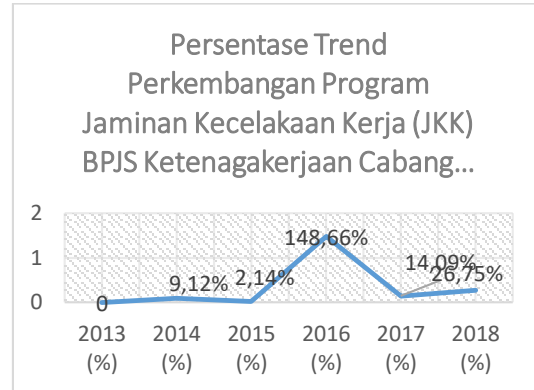
meningkat dari pada tahun-tahun sebelumnya yaitu sebesar 104.348 jiwa, angka ini merupakan peningkatan yang tertinggi dari pada tahun-tahun sebelumnya. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam keikutsertaan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dapat dilihat dari angka tenaga kerja sehingga jumlah partisipasi masyarakat meningkat dikarenakan para pekerja telah mendapatkan perbaikan atau kelayakan pekerjaan serta adanya kebijakan-kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kuantitas maupun kualitas infrastruktur yang berpengaruh terhadap pekerjaan.

Pencapaian Kepesertaan 4 Program BPJS Ketenagakerjaan

Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Cabang Pangkal Pinang setiap tahunnya mengalami fluktuasi. Salah satu faktor penyebab terus terjadinya fluktuasi/turun-naik Jumlah keikutsertaan masyarakat sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan ialah karena jumlah keikutsertaan masyarakat itu sendiri yang tidak menentu serta pemikiran masyarakat yang kerap kali berubah-ubah. Hal ini yang membuat jumlah pencapaian kepesertaan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Cabang Pangkal Pinang tidak selalu mengalami trend positif, meskipun dari tabel diatas menunjukkan bahwa hampir seluruh tahun mengalami kenaikan jumlah peserta, tetapi masih ada tahun-tahun yang mengalami penurunan pertumbuhan kepesertaan. Namun secara keseluruhannya terjadi penambahan jumlah peserta, artinya mayoritas tiap tahunnya memiliki trend perkembangan yang baik.

Untuk mengetahui trend perkembangan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan secara detail sebagai berikut:

1) Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

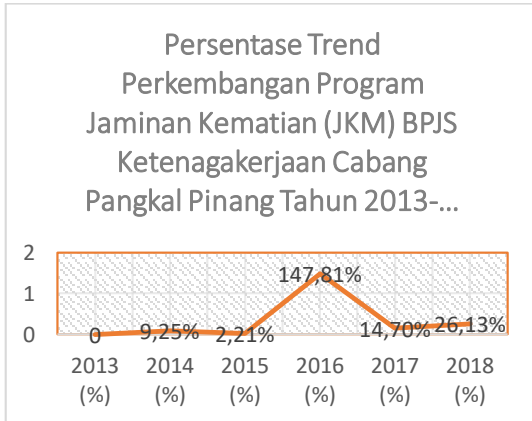


Sumber: BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pangkal Pinang, 2019

Gambar 2. Grafik Persentase Trend Perkembangan Program Jaminan Kecelakaan Kerja BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pangkal Pinang Tahun 2013-2018

Berdasarkan gambar 3 diatas peneliti menetapkan tahun 2013 sebagai tahun dasar dalam penelitian ini bisa kita lihat bahwa Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dari tahun 2013-2018 mengalami fluktuasi dimana prsentase tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 148,66 persen dan yang terendah terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 2,14 persen. Berdasarkan data dan analisa diatas kita ketahui bahwa tahun 2016 mengalami persentase tertinggi, hal ini disebabkan karena pihak BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pangkal Pinang telah melakukan sosialisasi sehingga banyak perusahaan yang memindahkan asuransinya dari Jamsostek ke asuransi BPJS Ketenagakerjaan. Sedangkan pada tahun 2015 mengalami penurunan yang sangat signifikan, pertumbuhannya tidak sebanding dengan pertumubuhan tahun sebelumnya yang berada pada angka 9,12 persen dikarenakan pihak BPJS Ketenagakerjaan baru mengganti namanya dan keluar dari perusahaan Jamsostek. Disisi lain kenapa peserta program JKK sedikit pada tahun tersebut, karena pada tahun tersebut telah berdiri perusahaan BPJS Kesehatan yang fungsinya memberi perawatan dan pengobatan. Sehingga pada tahun tersebut peserta ada sebagian peserta yang keluar dari program JKK dikarenakan telah berdirinya perusahaan BPJS Kesehatan yang kurang lebihnya memiliki fungsi yang sama dengan program JKK BPJS Ketenagakerjaan.

2) Program Jaminan Kematian (JKM)

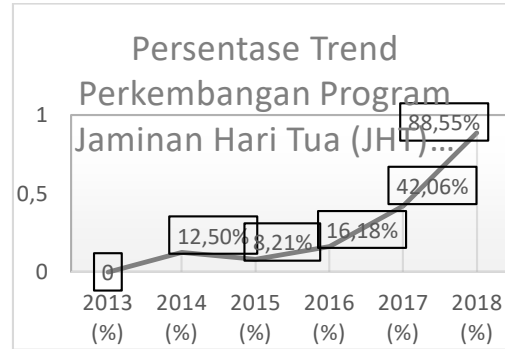


Sumber: BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pangkal Pinang, 2019

Gambar 3. Grafik Persentase Trend Perkembangan Program Jaminan Kecelakaan Kerja BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pangkal Pinang Tahun 2013-2018

Berdasarkan gambar 4 diatas peneliti menetapkan tahun 2013 sebagai tahun dasar dalam penelitian ini bisa kita lihat bahwa Program Jaminan Kematian (JKM) dari tahun 2013-2018 mengalami fluktuasi dimana persentase tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 147,81 persen dan yang terendah terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 2,21 persen. Berdasarkan data dan analisa diatas kita ketahui bahwa tahun 2016 mengalami persentase tertinggi, hal ini disebabkan karena pihak BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pangkal Pinang telah melakukan sosialisasi sehingga banyak perusahaan yang memindahkan asuransinya dari Jamsostek ke asuransi BPJS Ketenagakerjaan. Sedangkan pada tahun 2015 mengalami penurunan yang sangat signifikan dari pada tahun 2014 yang awalnya berada pada angka 9,25 persen, pertumbuhannya tidak sebanding dengan tahun sebelumnya dikarenakan pihak BPJS Ketenagakerjaan baru saja mengganti namanya serta keluar dari perusahaan Jamsostek.

3) Program Jaminan Hari Tua (JHT)



Sumber: BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pangkal Pinang, 2019

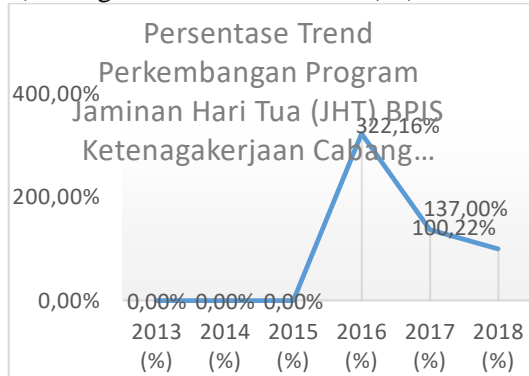
Gambar 4. Grafik Presentase Trend Perkembangan Program Jaminan Hari Tua BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pangkal Pinang Tahun 2013-2018

Berdasarkan gambar 5 diatas peneliti menetapkan tahun 2013 sebagai tahun dasar dalam penelitian ini bisa kita lihat bahwa Jaminan Hari Tua (JHT) dari tahun 2013-2018 mengalami fluktuasi dimana persentase tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 88,55 persen dan yang terendah terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 8,21 persen. Berdasarkan data dan analisa diatas kita ketahui bahwa tahun 2018 mengalami persentase tertinggi, hal ini disebabkan karena pihak BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pangkal Pinang telah gencar gencarnya melakukan sosialisasi sehingga banyak perusahaan yang mendaftarkan tenaga kerjanya. Faktor lain yang mendukung cepatnya persentase kenaikan kepesertaan Program JHT pada tahun 2018 ialah faktor akses yang semakin mudah karena pada tahun 2018 sudah adanya inovasi antrean online dan verifikasi sidik jari, dua fitur ini berbasis KTP elektronik dan sidik jari yang bertujuan untuk mempersingkat alur pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) dikantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Pangkal Pinang, hal inilah yang menarik animo masyarakat dan juga perusahaan untuk mendaftarkan tenagakerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Sedangkan pada tahun 2015 mengalami penurunan yang sangat signifikan dari pada tahun 2014 yang awalnya berada pada angka 9,25 persen, pertumbuhannya tidak sebanding dengan tahun sebelumnya dikarenakan pihak BPJS Ketenagakerjaan baru saja mengganti namanya serta keluar dari perusahaan Jamsostek. Faktor lainnya ialah terjadi penurunan kualitas yang diberikan oleh

pihak BPJS Ketenagakerjaan kepada peserta bisa kita lihat bahwa sering terlambatnya pencairan dana program JHT dan sering kali adanya ketidakcocokkan data.

hakikatnya memiliki trend pertumbuhan yang baik karena diatas 100 persen. Pada tahun 2018 tingkat pertumbuhan kepesertaannya berada pada angka 100,22 persen.

4) Program Jaminan Pensiun (JP)



Sumber: BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pangkal Pinang, 2019

Gambar 5. Grafik Persentase Trend Perkembangan Program Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pangkal Pinang Tahun 2013-2018

Berdasarkan gambar 6 diatas peneliti menetapkan tahun 2015 sebagai tahun dasar dalam penelitian ini bisa kita lihat bahwa Program Jaminan Pensiun (JP) dari tahun 2015-2018 mengalami fluktuasi dimana persentase tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 322,16 persen dan yang terendah terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 100,22 persen

Berdasarkan data dan analisa diatas kita ketahui bahwa tahun 2016 mengalami persentase tertinggi, hal ini disebabkan karena pada tahun tersebut adalah tahun kedua berjalannya program Jaminan Pensiun, jadi persentase 0 persen tahun dasar peneliti tetapkan pada tahun 2015. Karena hal tersebutlah yang membuat perusahaan ataupun masyarakat sangat tertarik dengan program baru BPJS Ketenagakerjaan tersebut, kemudian faktor selanjutnya ialah BPJS Ketenagakerjaan telah gencarnya melakukan sosialisasi tentang program ini. Faktor lain yang mendukung cepatnya persentase kenaikan kepesertaan program JP pada tahun 2016 ialah meningkatnya kesadaran masyarakat tentang betapa pentingnya Jaminan Pensiun. Sedangkan pada tahun 2018 mengalami sedikit penurunan walaupun

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan dari apa yang dibahas dalam penelitian ini maka peneliti menarik kesimpulan bahwa pada tahun 2018 adalah tahun dengan jumlah peserta paling banyak secara keseluruhan dan tahun 2015 adalah tahun dengan jumlah peserta paling sedikit secara keseluruhan serta pada tahun ini juga memiliki pertumbuhan yang paling rendah dikarena pada tahun tersebut adalah tahun transisi perpindahan dari Jamsostek ke BPJS Ketenagakerjaan dan juga ada sebagian peserta yang keluar dari program BPJS Ketenagakerjaan dikarenakan telah berdirinya perusahaan BPJS Kesehatan yang kurang lebihnya memiliki fungsi yang sama dengan program BPJS Ketenagakerjaan, selain itu juga ada beberapa program baru seperti Jaminan Pensiun dan program keluar seperti Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yang beralih menjadi BPJS kesehatan.

Kemudian pada tahun 2016 adalah tahun dengan jumlah persentase pertumbuhan paling tinggi dengan rata-rata pertumbuhan diatas 100 persen secara keseluruhan.

Saran

Berdasarkan dari apa yang dibahas dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan saran sebagai agar dapat meningkatkan jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pangkal Pinang sebaiknya perlu dilakukannya peningkatan kualitas karyawan BPJS Ketenagakerjaan agar dapat mensosialisasikan mengenai manfaat dari program BPJS Ketenagakerjaan agar seluruh masyarakat/tenaga kerja yang termasuk dalam kawasan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pangkal Pinang khususnya di Pulau Bangka mengetahui apa sebenarnya manfaat dari program jaminan sosial. Selain itu juga diharapkan pihak BPJS Ketenagakerjaan kembali menjelaskan tentang pentingnya program jaminan sosial bagi tenaga kerja.

Perlu dilakukannya peningkatan/penambahan sarana yang

mendukung akses segala informasi yang terkait dengan Program BPJS Ketenagakerjaan di Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Pangkal Pinang, tujuannya agar memudahkan daripada peserta untuk mengurus segala yang terkait dengan Program BPJS Ketenagakerjaan sehingga dapat menarik masyarakat/tenaga kerja untuk mendaftar sebagai kepesertaan BPJS ketenagakerjaan.

REFERENSI

Abdullah, Junaidi, 2018. Bentuk - Bentuk Jaminan Sosial Dan Manfaatnya Bagi Tenaga Kerja Dalam Hukum Ketenagakerjaan Indonesia

Bachani, Achmad, 2016, Kependudukan Dan Ketenagakerjaan.
<http://www.loveekonomi.com>. Diakses tanggal: 26 Juli 2019

Anonimus. 2011. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
<http://www.bpjsketenagakerjaan.co.id>. Diakses tanggal: 27 Juli 2019

----- 2011. Info Lengkap Tentang Program Jaminan Hari Tua (JHT).
<http://www.gajimu.com>. Diakses tanggal: 27 Juli 2019

----- 2011. Info Lengkap Tentang Program Kecelakaan Kerja (JKK).
<http://www.gajimu.com>. Diakses tanggal: 27 Juli 2019

----- 2011. Info Lengkap Tentang Program Kecelakaan Kerja (JKK).
<http://www.gajimu.com>. Diakses tanggal: 27 Juli 2019

----- 2011. Info Lengkap Tentang Program Jaminan Pensiun (JP).
<http://www.gajimu.com>, Diakses tanggal: 27 Juli 2019

----- 2016. Permasalahan Ketenagakerjaan Dalam Pembangunan Ekonom.
<http://www.gajimu.com>. Diakses tanggal: 27 Juli 2019

----- 2017. Mengenal BPJS Ketenagakerjaan Bagi Perusahaan.
<http://www.jurnal.id.blog>. Diakses tanggal: 27 Juli 2019

BPS, 2000. Statistika Indonesia 1999. Badan Pusat Statistik. Jakarta

BPS, 2016. Statistika Indonesia 2015. Badan Pusat Statistik. Bangka Belitung

BPS, 2019. Statistika Indonesia 2018. Badan Pusat Statistik. Bangka Belitung

Deliarnov, 2013. Perkembangan Pemikiran Ekonomi, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Desi, 2018. Trend Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan di Kota Pangkal Pinang Tahun 2014-2017

Purnama, Intan 2017. Pengaruh Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Terhadap Motivasi Bekerja Karyawan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kendari

Jhingan, M.L, 2008. Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Jamsostek

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977 tentang Asuransi Tenaga Kerja

S, Mulyadi, 2003. Ekonomi Sumber Daya Manusia, Jakarta: PT. Grafindo Persada

Sanusi, Bachrawi, 2004. Pengantar Ekonomi Pembangunan, Jakarta: PT. Rineka Cipta

Saputa, Andika, 2013. Analisis Trend Perkembangan Kepesertaan Jamsostek Cabang Padang Kanwil 1 Tahun 2008-2013

Sari, Regina, Hani, 2015. Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011

Siregar, Maya Adelina, 2009. Pengaruh Program Jaminan Sosial Terhadap Manfaat Yang Diterima Tenaga Kerja Sebagai Peserta PT. Jamsostek (Persero) Medan

Sukirno, Sadono, 2015. Pembangunan Ekonomi Edisi Kedua, Jakarta: PT. Prenadamedia Group

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial

Wahab, Zulaini, 2001. Dana Pensiun dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Di Indonesia, Bandung:PT. Citra Aditya Bakti

Zulaikah, 2014. Pengaruh Pemanfaatan Program Jaminan Sosial Sebagai Motivasi Dan Pekerja Di Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2013

Zulfa, Ernisa, 2016. Analisis Kinerja BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Semarang Pemuda Untuk Meningkatkan Perluasan Kepesertaan Sektor Informal

